

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya yang tinggi. Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah seluas-luasnya untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, (Lake 2022).

Akuntabilitas dari pemerintah merupakan salah satu dari indikasi tegaknya perekonomian suatu negara. Pemerintah yang akuntabel merupakan pemerintah yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban tertulis berupa penyajian laporan keuangan atas kinerja yang telah dicapai, pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Setiap entitas, termasuk pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD).

Dengan pemberlakuan pemerintah yang otonom maka terjadi perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini beralasan karena pengelolaan keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga sebagaimana amanah otonomi daerah. Pengelolaan keuangan antara lain bertujuan untuk pengendalian dana, menerapkan prinsip efisiensi dibidang pembiayaan dan pengelolaan daerah sehingga tercipta kondisi keuangan daerah yang efisien dan efektif dengan kinerja yang tinggi, dan dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan ini pada akhirnya dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah, (Lake 2022).

Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah daerah terdapat 7 komponen laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Salah satu laporan yang menjelaskan posisi keuangan pemerintah daerah yaitu laporan neraca. Laporan neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Untuk keperluan publikasi cukup ditampilkan rekening utama dan sub rekening satu level dibawahnya, sedangkan untuk kepentingan eksekutif dibutuhkan penyajian secara lengkap dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Informasi yang didapat

diperoleh dari format laporan keuangan berupa neraca antara lain: informasi keuangan berupa kondisi aset lancar, seperti : kas, piutang, persediaan yang mempunyai masa manfaat dalam periode 12 bulan atau 1 tahun mendatang, Informasi keuangan tentang investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang yang memberikan informasi manfaat yang akan diperoleh pada periode 12 bulan berikutnya (investasi jangka pendek) maupun manfaat tahun-tahun selanjutnya (investasi jangka panjang), Informasi keuangan tentang kondisi aset tetap, yang mempunyai manfaat ekonomis bagi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada masa mendatang, Informasi keuangan tentang beban kewajiban yang harus diselesaikan pada periode jangka pendek maupun jangka panjang (lebih dari 1 tahun), Informasi keuangan berupa ekuitas daerah mencerminkan nilai kekayaan bersih daerah pada tanggal neraca disusun, (Baitanu, 2022)

Kewajiban menurut Standar Akuntansi Pemerintah didefinisikan sebagai utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat juga dipahami bahwa utang atau kewajiban merupakan klaim pihak ketiga tersebut telah memberikan sejumlah dananya kepada pemerintah daerah di masa lalu ,(Mamudi 2019: 4)

Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu: kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12

bulan setelah tanggal neraca. Sedangkan kewajiban jangka panjang temponya lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, ekuitas didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas juga dapat dipahami sebagai hak residual pemerintah atas aktiva pemerintah setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas dana berdasarkan SAP lama yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: 1) ekuitas dana lancar, 2) ekuitas dana investasi, dan 3) ekuitas dana cadangan. Namun Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, akun ekuitas tidak dirinci lagi dalam tiga jenis ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana cadangan, namun cukup dibuat satu akun yaitu ekuitas saja. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek/lancar. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah sangat penting untuk dianalisis, tujuannya adalah untuk memahami dan mendiagnosa informasi yang terkandung dalam kewajiban dan ekuitas yang dimiliki dengan tujuan untuk menilai kesehatan keuangan serta membuat perkiraan tentang prospek masa depan suatu pemerintahan, analisis kewajiban perlu dilakukan agar dapat diketahui dengan jelas berapa sebenarnya kewajiban yang segera jatuh tempo

dan belum jatuh tempo, mana kewajiban yang paling besar setiap tahunnya dan seberapa mampu pemerintah daerah membiayai kewajibannya. Selanjutnya dari semua itu dapat diketahui apakah ekuitas dana cenderung lebih meningkat atau menurun setiap tahunnya sehingga bila ekuitas dana menuju ke negatif akan diketahui bahwa kewajiban lebih besar dari kekayaan yang dimiliki. Suatu kewajiban dikatakan baik apabila ekuitas dana tersebut mengalami peningkatan atau lebih besar dan mampu dalam membiayai kewajiban yang timbul, (Lake, 2022). Jika ekuitas dan modal suatu entitas itu tidak sehat maka dampaknya akan berpengaruh pada ketidakmampuan memperoleh pinjaman, yang dimana investor dan pemberi pinjaman mungkin tidak tertarik untuk menyuntikan dana tambahan hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan/entitas. Adapun juga pemerintah akan kesulitan untuk melunasi hutang. Yang dimana jika ekuitas dan modal tidak mencukupi, pemerintah mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar utang yang jatuh tempo. Perkembangan ekuitas dan kewajiban dapat memiliki dampak signifikan pada kinerja keuangan suatu entitas. Perubahan dalam ekuitas dan kewajiban dapat mencerminkan perubahan struktur modal, tingkat risiko, dan kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Perkembangan ekuitas, penambahan modal: jika entitas berhasil memperoleh tambahan modal dari pemilik atau investor eksternal, ekuitasnya akan meningkat. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan entitas untuk membiayai pertumbuhan, investasi, dan ekspansi bisnis. Dalam jangka panjang, penambahan modal juga dapat memberikan

daya tarik bagi calon investor dan meningkatkan nilai perusahaan. Perkembangan kewajiban, peningkatan hutang: jika entitas mengambil pinjaman atau menerbitkan obligasi baru, kewajiban entitas akan meningkat. Pembayaran utang: melunasi utang dapat mengurangi kewajiban entitas. Pembayaran hutang dapat terjadi melalui pembayaran cicilan pinjaman, pengurangan jumlah hutang, atau pelunasan hutang jangka pendek yang jatuh tempo. Pengurangan kewajiban dapat meningkatkan kestabilan keuangan entitas dan mengurangi beban bunga yang harus dibayar. Setelah memperhatikan perkembangan ekuitas dan kewajiban, langkah selanjutnya adalah menghitung rasio kinerja keuangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesehatan keuangan entitas.

Ada beberapa cara untuk menilai kondisi keuangan suatu entitas yaitu dengan menggunakan analisis pertumbuhan kewajiban terhadap ekuitas, analisis kewajiban terhadap aset, analisis kewajiban terhadap total pendapatan daerah, analisis struktur ekuitas. Setiap rasio ini memiliki fungsi yang berbeda-beda seperti rasio utang terhadap ekuitas untuk memberikan indikasi beberapa bagian dari ekuitas yang diperlukan untuk mendanai utang. Informasi ini juga penting untuk mengetahui struktur pembiayaan pemerintah daerah. Rasio utang terhadap aset digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi utangnya dengan aset modal yang dimilikinya apabila terjadi kegagalan dalam pembayaran utang. Rasio utang terhadap pendapatan daerah merupakan perbandingan antara total total utang dengan total pendapatan daerah. Analisis struktur ekuitas bermanfaat untuk mengetahui

proporsi dari utang terhadap ekuitas. Struktur ekuitas yang baik mencerminkan adanya harmonisasi antara sumber pembiayaan eksternal dengan pembiayaan internal, (Mahmudi, 2019:4).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggambarkan kondisi keuangan yang dimiliki, yang dapat disajikan dalam laporan neraca.

Berikut ini data neraca Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Laporan Neraca Tahun Anggaran 2018-2022

	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
Akun/Keterangan	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021(Rp)	2022 (Rp)
Aset					
Jumlah Aset Lancar	935.016.20 2.633,89	463.402.59 5.083,15	269.666.04 1.007,46	482.245.798 .151,61	479.497.721 .039,95
Jumlah Investasi Jk. Panjang	620.663.88 7.555,27	592.998.22 5.439,52	594.630.89 5.887,37	829.823.515 .360,80	865.331.161 .186,46
Jumlah Aset Tetap	6.381.894.6 81.395,48	7.973.851.6 65.808,52	8.500.707.9 94.266,59	9.165.391.0 28.141,05	9.843.614.8 99.262,26
Jumlah Aset Lainnya	121.417.95 9.045,31	117.894.40 1.496,29	415.725.31 3.780,80	397.673.292 .723,31	373.972.116 .462,34
Jumlah Aset	7.518.932.7 30.629,95	9.148.346.8 87.827,31	9.780.730.2 44.942,22	10.875.133. 634.376,80	11.663.434. 647.950,70
Kewajiban					
Jumlah Kewajiban Jk. Pendek	105.745.95 2.223,70	56.929.422. 509,42	156.520.94 8.224,28	390.635.768 .027,47	286.124.959 .115,17
Jumlah Kewajiban Jk. Panjang			71.958.361. 000,00	250.778.440 .000,00	980.887.323 .256,00
Jumlah Kewajiban	105.745.95 2.223,70	56.929.422. 509,42	228.479.30 9.224,28	641.414.208 .027,47	1.267.002.2 82.371,77
Ekuitas					
Jumlah Ekuitas Dana	7.413.186.7 78.406,25	9.091.417.46 5.317, 89	9.552.250.9 35.717,94	10.223.719. 426.349.30	10.396.432. 365.578,90

				10.223.719. 426.349,30	10.396.432. 365.578,90
Jumlah Ekuitas Dana	7.413.186.7 78.406,25	9.091.417.4 65.317,89	9.552.250.9 35.717,94		
Jumlah Ekuitas Dana dan Kewajiban	7.518.932.7 30.629,95	9.148.346.8 87.827,31	9.780.730.2 44.942,22	10.875.133. 634.376,80	11.663.434. 647.950,70

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa pada tahun 2018 jumlah kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.105.745.952.223,70, dan pada tahun 2019 turun menjadi sebesar Rp. 56.929.422.509,42, dan juga pada tahun 2020 kembali meningkat sebesar Rp.228.479.309.224,28. Kondisi ini pula akan sangat berpengaruh bagi penstabilan ekonomi Pemerintah Provinsi NTT sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam anggaran pemerintah daerah. Jika pemerintah tidak dapat mengelola keuangan dengan baik, ini akan berdampak pada perencanaan anggaran menjadi sulit karena akan sulit memperkirakan pendapatan dan pengeluaran yang tepat, pemerintah juga akan sulit untuk mengakses ke pasar keuangan untuk mendapatkan pinjaman dengan suku bunga terjangkau (penurunan nilai kredit).

Sedangkan jumlah ekuitas dana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 sebesar Rp.7.413.186.778.406,25 pada tahun 2019 sebesar Rp.9.091.417.465.317,89, pada tahun 2020 sebesar Rp.9.552.250.935.717,94. Ekuitas pemerintah Provinsi NTT mengalami peningkatan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki lebih banyak aset atau nilai kepemilikan yang dapat digunakan sebagai sumber daya keuangan. Penurunan ekuitas juga bisa mengurangi daya tarik pemerintah

daerah sebagai peminjam dan dapat mengakibatkan peningkatan biaya pinjaman.

Kewajiban dan ekuitas dana merupakan salah satu bagian yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi NTT jika dilihat dari tahun 2018-2020 cenderung mengalami peningkatan karena pemerintah daerah mungkin meningkatkan aktifitas pembangunan infrastruktur dan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dari masyarakat. Meskipun ekuitas juga meningkat, peningkatan kewajiban dapat menimbulkan beban keuangan tambahan bagi pemerintah daerah, seperti pembayaran utang bunga atau peningkatan biaya operasional tapi perlu dianalisis kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kewajiban-kewajiban atau pembiayaan yang timbul.

Berdasarkan uraian masalah diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti Kewajiban dan Ekuitas Dana untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah provinsi NTT dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan.

Dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan judul” **Analisis Kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018-2022**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2018-2022 jika dilihat dari analisis rasio kewajiban dan rasio ekuitas?
2. Faktor apa yang menyebabkan fluktuasi kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Provinsi NTT tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah provinsi NTT dilihat dari rasio- rasio kewajiban dan rasio-rasio ekuitas tahun 2018-2022
2. Untuk mengetahui faktor penyebab fluktuasi kewajiban dan ekuitas dana pemerintah provinsi NTT tahun 2018-2022

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang struktur dan kondisi keuangan pemerintah, termasuk kewajiban dan ekuitas

2. Bagi Instansi

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang stuktur kewajiban dan ekuitas dana pemerintah Provinsi NTT lebih tepatnya pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dalam menentukan kebijakan yang diambil

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai analisis kewajiban dan ekuitas dana